

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Muncul pertanyaan menarik, mengapa setelah sistem demokrasi semakin tertata dengan baik pasca runtuhnya Rezim Soeharto tahun 1998 justru semakin banyak menimbulkan faksionalisasi dan berdampak luas terhadap perpecahan internal partai politik. Berbagai fakta awal memperlihatkan perpecahan internal partai di Indonesia dapat dibedakan dalam dua wilayah nasional dan daerah. Perpecahan internal partai disebabkan tajamnya perbedaan faksionalisasi yang melahirkan lahirnya partai-partai politik yang baru, serta perpecahan pengurus yang ditandai dengan dualisme kepemimpinan.

Dinamika faksionalisasi di internal partai politik tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia lainnya Seperti di Brasil (Neto & Santos, 2001), Uruguay (Morgenstern, 2001), Jepang, Inggris, Kanada, dan Italia (Browne & Kim, 2003; Bettcher, 2005; Ceron, 2011; Boucek 2012, 2013; Ozzano, 2013), China (Huang, 2006; Chen & Hong, 2020), Bulgaria, Perancis, Russia (Waller & Gillespie, 2007), Hungaria (Lomax, 2007), Polandia (Lewis, 2007; Magone, 2007), Republik Ceko (Kopecky, 2007), Turki (Tursan, 2007; Ozzano, 2013; Musil & Bilgin, 2016), Yunani (Magone, 2007; Eleftheriou, 2009), Portugal (Magone, 2007; Crockill, 2007), Thailand (Chamber, 2008; Chambers & Croissant, 2010; Chambers & Waitoolkiat, 2020), Jerman (Bernauer & Bräuning, 2009; Ozzano, 2013), Tunisia (Ozzano, 2013) dan USA (Reiter, 2004; Medvic, 2007; Koger et al,

2010; Ozzano, 2013; Thomsen, 2017; College, 2020), Australia (Leigh, 2010), Spanyol (Verge & Gomez, 2012), Taiwan (Gobel, 2012), Inggris (Rainsford, 2017; Dennis, 2019), Uganda (Wilkins, 2019), dan Filipina (Teehanke, 2020).

Sebagai contoh, beberapa hasil studi faksionalisme dan alokasi sumberdaya partai di Italia di jelaskan Andrea Ceron (2011) menggambarkan tentang faksionalisasi yang dipengaruhi oleh daya tarik alokasi sumberdaya partai politik dan keseimbangan partai politik yang lebih solid menyatu atau justru sebaliknya mengalami perpecahan. Bettcher (2005) mengklasifikasi kapasitas pengorganisasian dan kekuatan faksi di internal partai. Boucek (2012) menggambarkan partai-partai dominan di Jepang, Inggris, Kanada, dan Italia mengalami kekalahan dalam pemilu setelah tidak mampu mengendalikan dampak faksionalisasi di internal.

Sedangkan Studi Kasus tentang faksionalisme partai politik di Indonesia masih terbatas dan hanya di level nasional. Misalnya beberap hasil penelitian (Fionna & Tomsa, 2017) menyoroti berbagai model aliansi klientelistik berdasarkan keinginan bersama untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya patronase Partai yang beraliran Nasionalis maupun Islam. Bahkan dalam penelitian terbaru, (Fionna & Tomsa, 2020) menemukan berbagai bentuk pergeseran faksionalisme partai di level Nasional dari bentuk faksi Prinsipil ke faksi Patronase yang memiliki sumberdaya, pola kepemimpinan partai yang personalistik, dan dinastik.

Kajian lainnya (Budiatri, 2018) menjelaskan faktor penyebab faksionalisme partai dipengaruhi oleh konflik internal

ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim.

Faksionalisme partai diikuti oleh perpecahan internal dalam persaingan koalisi Pilpres menunjukkan bahwa partai tidak memiliki kekuatan perekat ideologi dan kohesivitas nilai, perilaku pragmatisme, motif ekonomi, memburu jabatan, dan modus pencari suara di Indonesia (Romli, 2018, 207). Namun berbeda dengan Budiarti dan Romli, faksionalisme disebabkan oleh perbedaan dalam menerjemahkan ideologi partai dan platform partai, bukan faksi yang disebabkan atas dasar kepentingan sesaat, perbedaan cara pandang terhadap kekuasaan yang muncul disebabkan perebutan kekuasaan internal partai (Nurhasim, 2018: 304). Faksionalisme di Indonesia berimplikasi pada memburuknya derajat konsolidasi dan institusionalisasi partai. Dampak faksionalisme lainnya yakni terjadi perpecahan internal partai, diikuti oleh merosotnya suara dan kursi dalam sistem elektoral (Harris, 2018:324).

Faksionalisme dan Perpecahan partai politik telah berdampak dalam eksodus faksi yang tersisih ke partai politik lainnya. Berpindahnya anggota partai tersebut mungkin saja dapat mempengaruhi merosotnya perolehan suara partai politik yang ditinggalkan, dan sebaliknya menguntungkan partai politik baru. Perpecahan internal partai di tengah transisi politik Indonesia oleh Klinken ditandai oleh tahapan transisi dan aturan-aturan hukum, yang dirundingkan kembali demi pemilu yang

kompetitif, dan kekuasaan antara pendukung rezim lama dan demokrat baru (Budiman, dkk, 2008: 75).

Meskipun konstestasi partai-partai politik pada empat pemilu legislatif 1999 dan 2004, 2009 dan 2014 telah dilewati dan telah meletakkan tradisi baru demokrasi, namun tidak dapat menghindari perpecahan internal partai politik. Fenomena lainnya adalah partai politik dianggap masih lemah karena tidak didasarkan pada prinsip kebijakan tetapi pada kepentingan faksi, pribadi, belum menjadi saluran politik dalam memberi tekanan pada lembaga-lembaga negara, terutama birokrasi negara. Akibatnya memunculkan tindakan frustrasi rakyat yang beragam yang membelah garis etnis atau agama. Seiring dengan runtuhnya pemerintah Orde Baru memunculkan banyak sengketa lama muncul kembali (UNDP, 2001: 1-2).

Perpecahan internal partai politik juga disebabkan oleh bangkitnya kembali ideologi politik aliran. Politik aliran pada pemilu 1955 berdasarkan pembelahan struktur masyarakat, pola dan relasi politik yang terpolarisasi, kini kembali membentuk pola relasi antar parpol menguat pada arah kanalisasi aliran yang cenderung cair. Fenomena lainnya perpecahan partai politik ditandai oleh masih lemahnya pengakaran (Herbert Feith and Lance Castles, 1970: 14). Fenomena lainnya dapat digarisbawahi bahwa jauh sebelum pemilu legislatif 2004, partai-partai besar berperilaku oligarkis. Kultur elitis akan menimbulkan personalisasi politik yang melembaga (Dhakidae (2004:6).

Perpecahan internal partai politik justru akan memperburuk kestabilan organisasi partai politik. Institusionalisasi partai di Indonesia masih mengalami hambatan pada beberapa aspek

yaitu (1) lemahnya tingkat kompetisi antar partai secara demokratis; (2) karakter partai yang terjebak pada kepentingan pribadi (*self-interested*), korupsi prematur, terpolarisasi, kebangkrutan dan tidak efektif; (3) struktur organisasi partai yang lemah, pendanaan yang tidak teratur dan transparan, tidak otonom, partai dengan gaya kepemimpinan yang personalistik, dan diperkuat oleh faksi-faksi yang memiliki potensi perpecahan internal partai (Tan, 2006: 88-114).

Munculnya faksi-faksi sebenarnya bertujuan baik dalam memfasilitasi kerjasama dalam agregasi kepentingan bermacam-macam kelompok yang muncul dalam tubuh partai. Beberapa partai politik mengalami perpecahan internal namun mampu disatukan kembali dengan penguatan ideologi dan ketokohan partai menuju konsensus internal. Sedangkan beberapa partai lainnya mengalami kasus perpecahan karena tidak mampu mengatasi dinamika faksionalisasi dalam mengelola konflik internal.

Akar faksionalisme partai politik Islam dan Nasionalis dapat dirunut kembali ke beberapa kurun waktu sebelum Pemilu 1977, Fusi Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia digabungkan pada tahun 1975 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

Seiring dengan penyederhanaan partai politik, PPP dibentuk dari gabungan partai-partai politik Islam yaitu Partai Nahdlatul

Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi pada 5 Januari 1973. Hasilnya, sejak Pemilu 1971 sampai Pemilu 1997, Golkar mendominasi Pemilu yang tidak demokratis.

Memasuki era reformasi, perpecahan faksi-faksi dalam partai politik semakin nyata ditandai oleh munculnya partai-partai Politik baru yang mengikuti pemilu 1999 sampai pemilu 2014. Hasil pemilu menunjukkan bahwa perpecahan faksi cenderung terjadi pada beberapa partai dominan seperti Golkar, PDI-P, dan Partai politik berbasis agama.

Bahkan faksi-faksi yang bertikai lebih memilih keluar dan membentuk partai politik baru. Golkar mengalami perpecahan yang ditandai oleh terbentuknya partai-partai politik baru seperti MKGR (1998), PKPI (1999), PKPB (didirikan R.Hartono tahun 2002), Hanura (dibentuk Wiranto tahun 2006), Gerindra (dibentuk Prabowo tahun 2008), Nasdem (dibentuk Surya Paloh tahun 2010) dan Partai Berkarya (dibentuk Tommy Hutomo Mandala Putra tahun 2016).

PDIP juga pernah mengalami perpecahan internal oleh beberapa elite partai ke dalam beberapa partai politik bentukan baru seperti PITA (dibentuk oleh Dymyati Hartono tahun 2001), PNBK (dibentuk Eros Djarot tahun 2002), PDP (dibentuk oleh Laksamana Sukardi dan Roy B. B. Janis tahun 2005), PPDI (dibentuk Endung Sutrisno tahun 2001), dan PDPR ; PAN dengan PMB (dibentuk Imam Adduruqutni tahun 2006); PKB dengan PKU (didirikan Yusuf Hasyim tahun 1998), Hasyim PKNU (2006), dan PKBIB (dibentuk Yeni Wahid tahun 2002 yang mengalami perubahan nama PKBN tahun 2011; PPP dengan PP (didirikan oleh H.J. Naro tahun 1999), dan PBR (didirikan oleh Bursah Zarnubi tahun 2002); Partai Demokrat dengan Partai NKRI (2006); PBB mengalami perpecahan dengan PII meskipun tidak signifikan (Budiarti, 2017: 265-279). Demikian pula elite partai PKS yang

memilih keluar dengan membentuk kekuatan organisasi GARBI yang bertransformasi ke partai politik baru GELORA tahun 2020 (Prihutomo et al, 2019).

Tabel. 1. 1. Perpecahan Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

No	Partai Politik	Partai dan Tokoh
1.	Golkar	PKPI (1999); PKPB (R. Hartono tahun 2002); Hanura (Wiranto tahun 2006); Gerindra (Prabowo tahun 2008); Nasdem (Surya Paloh tahun 2010); Partai Berkarya (dibentuk Tommy Hutomo Mandala Putra tahun 2016)
2.	PDI-P	PITA (Dymyati Hartono tahun 2001); PNBK (Eros Djarot tahun 2002); PDP (Laksamana Sukardi dan Roy B. B. Janis tahun 2005); PPD (dibentuk Endung Sutrisno tahun 2001)
3	PPP	PP (H.J. Naro tahun 1999); PBR (KH. Zainudin M.Z dan Bursah Zarnubi tahun 2002);
4.	PKB	PKU (Yusuf Hasyim tahun 1998), Hasyim PKNU (2006); PKBIB (Yeni Wahid tahun 2002 yang mengalami perubahan nama PKBN tahun 2011
6.	PAN	PMB (Imam Adduruqutni, tahun 2006)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber Media Massa

Mencermati Faksionalisme telah ada sejak runtuhnya rezim Orde Baru. Perpecahan internal disebabkan oleh perpecahan program yang dikendalikan oleh jaringan patronase yang menjadi kekuatan pendorong partai politik. Faksi-faksi didominasi oleh aliansi klien terhadap sumber daya patronase. Perilaku personalistik dalam kepemimpinan partai dapat dilihat pada figur politik yang tidak terkalahkan seperti Megawati di PDIP, Amien Rais di PAN, dan Abdurrahman Wahid. Sedangkan Golkar tidak memiliki figur sentral dan personalistik yang kuat, namun memiliki faksi yang lebih plural dan terorganisir yang sangat

rentan terhadap perpecahan menjadi beberapa partai-partai politik baru. Golkar dan PPP masih sulit menemukan kepemimpinan yang kuat namun masih memiliki identitas berbasis nilai yang bisa bertindak sebagai perekat terhadap faksi yang bersaing. Dewasa ini personalisasi partai politik semakin menguat di beberapa pimpinan partai (Fiona dan Tomsa, Op. Cit, 2017: 3-4).

Partai Demokrat identik dengan patronnya Susilo Bambang Yudoyono, Megawati Soekarno Putri (PDIP), Prabowo Subianto (Gerindra), Wiranto (Hanura) dan Surya Paloh (Nasdem). Demikian pula temuan penelitian terbaru menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya konflik internal dan faksionalisasi partai politik era reformasi disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab faktor internal antara lain nilai ideologi, kompleksitas sosiologi partai, struktur organisasi partai dan pola kepemimpinan elite. Sedangkan faktor eksternal meliputi meliputi sistem kepartaian, sistem pemilu, pilihan koalisi dan kepentingan kekuasaan, serta regulasi dan intervensi pemerintah (Budiatri, 2017: 265-279).

Kajian faksionalisme tersebut di atas menggambarkan berbagai dinamika perpecahan dan konflik di level nasional. Kajian politik lokal tentang dinamika konflik partai politik di ranah lokal relatif dinamis, namun belum menyentuh topik tentang faksionalisme partai di ranah lokal masih terbatas jumlahnya.

Kajian (Asmadianto & Nurmandi, 2015) tentang Konflik Internal dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat menjelang Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Barat tahun 2014 mengurai konflik faksi dalam tubuh Golkar dalam kepentingan

koalisi dan persaingan internal kelompok. Demikian pula (Makhasin, 2015) yang meneliti tentang Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah menemukan dinamika ini bersumber dan fragmentasi dan faksionalisme partai politik, yakni Koalisi Kecil-Ideologis (KKI), Koalisi Kecil-Pragmatis (KKP), Koalisi Besar-Ideologis (KBI), dan Koalisi Besar-Pragmatis (KBP).

Dinamika faksionalisme internal Partai Islam level lokal dapat ditelusuri pada beberapa partai politik seperti PPP, PKS, PAN, PKB di daerah. Hasil penelitian (Alfirdaus, dkk., 2019) tentang Politik Familisme di Tubuh Partai Islam Lokal menggambarkan elit dan anggota partai dengan studi kasus di PPP Kabupaten Rembang. Fenomena politik familisme memiliki relasi dengan kekeluargaan, santri/murid/jamaah melibatkan pesantren maupun relasi genealogis (orangtua, anak dan saudara) dan relasi sosiologis (kiai-santri). Implikasi politik berdampak terhadap pengambilan keputusan partai, penyusunan struktur kepengurusan partai, penyusunan daftar calon legislatif (caleg) mengutamakan relasi keluarga.

Tingginya konflik internal partai politik Islam juga disebabkan oleh lemahnya solidaritas kelompok dalam mengurangi dampak buruk perebutan kekuasaan struktur partai. Hasil penelitian (Undang & Thamrin, 2016) bahwa terjadi pergeseran bandul politik di internal partai Islam di berbagai daerah dari dari polarisasi politik aliran (ideologis) ke fragmentasi politik parokial (fragmatis) yang melibatkan tokoh agama, Kiai dan Ulama politisi lainnya. Kajian yang sama juga diungkapkan (Herdiansah, 2017) tentang tindakan yang diambil elite partai

politik Islam telah bergeser dari garis Partai ideologis ke tindakan pragmatis dalam menyikapi berbagai fenomena sosial.

Berkaitan dengan pilihan topik kajian tentang faksionalisme partai politik Islam PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara sebagai fokus kajian, penulis mengungkapkan perhatian peneliti sebelumnya yang lebih menyoroti beberapa aspek politik lokal yaitu perpecahan dan konflik internal partai, konflik politik identitas etnis, dan politik dinastik. Beberapa fenomena lokal tentang faksionalisasi dan konflik internal partai juga terjadi di Maluku Utara.

Kajian (Abdurrahim & Ratnawati, 2005) mengungkapkan bahwa daya Tarik Sultan sebagai tokoh politik lokal mampu menggiring anggota faksi menggungguli Golkar dalam Pemilu Legislatif 2004 di Ternate. Semakin menguatnya faksi Sultan Ternate Mudaffar Syah setelah terdepak dari Ketua Golkar, dan memilih Partai Persatuan Demokrasi kebangsaan (PPDK). PPDK berhasil mengalahkan partai-partai dominan Golkar dan PDI-P. Kemenangan ini dipengaruhi oleh kemampuan faksi Etnis ternate dalam menyokong kharisma aktor, dan identitas etnis.

Demikian pula kajian (Misrina, 2007) tentang Metamorfosis Faksionalisme Internal Partai Golkar di Maluku Utara pada PILKADA 2007. Kajian ini menggambarkan tentang dinamika faksionalisme di internal Partai Golkar dalam pola pragmatis elit Partai Golkar dan hubungan patron-klien antar-elite yang menyebabkan konflik dan fragmentasi faksi terpecah mejadi dua kubu (bipolar) yaitu kubu pro Thaib Armain-Abdul Gani Kasuba dan kubu pro Abdul Gafur- Abdurrahim Fabanyo.tersebut dapat

memberikan pilihan tentang munculnya berbagai kasus faksionalisme partai politik Islam di daerah.

Selain itu ada penelitian (Pora, et al., 2018) tentang kepentingan elite DPW PAN Maluku Utara dalam perebutan kekuasaan di internal partai yang didorong oleh motif pragmatisme elit partai menjelang Pemilu dan Pilkada di Maluku Utara, fenomena eksodus keluar dari PAN ke partai lainnya. Kajian terbaru tentang pragmatism elite partai (Umar dan Kahar, 2020) terungkap bahwa politik identitas berbasis etnis pasangan Abdul Gani Kasuba (representasi Etnis Tobelo-Galela) dan Pasangannya Ali Yasin (etnis Tidore-Patani) dalam Pilgub 2018 lebih bersifat pragmatis melalui jaringan etnis, suku dan agama.

Persaingan internal dalam faksi elite politik di Maluku Utara lebih didominasi pola persaingan antar dinastik maupun dalam dinastik politik kekerabatan. Hasil penelitian (Husen, 2016) menelusuri Konflik politik Pilgub Maluku Utara tahun 2007 sebagai Pilgub terburuk dan terlama dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Politik identitas etnis Maluku Utara (Salim, 2015), Politik modalitas ekonomi dinastik (Wance & Djae, 2019) dan modalitas sosial Politik Dinastik (Muksin et al., 2019) mengungkapkan Pilgub 2013 dan Pilgub 2018 adalah persaingan politik antar Politik Dinastik Ahmad Hidayat Mus dengan Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Kasuba dalam bentuk perpecehan internal Dinastik politik Kasuba di Maluku Utara.

Menguatnya faksionalisme, politik dinastik, Politisasi etnis dalam faksi-faksi yang saling bertikai, serta menguatnya perilaku pragmatis tokoh partai Politik Islam di Maluku Utara sangat

menarik dielaborasi dalam pilihan topik penelitian ini. Pilihan faksionalisme partai politik Islam tentu saja berdasarkan pada mata rantai konflik politik identitas, SARA dan etnis sejak Pemekaran Maluku Utara sebagai Provinsi baru tahun 1999 silam hingga saat. Pilihan terhadap partai politik Islam juga disadarkan pada keterlibatan tokoh politik Islam di Maluku Utara sangat dominan dalam konflik SARA, tetapi justru berdampak terhadap menguatnya dampak faksi yang buruk di tengah perpecahan internal dan menurunnya hasil elektoral.

Tentu saja identifikasi Pilihan terhadap ketiga partai politik PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara memiliki beberapa alasan tertentu. **Pertama**, dalam analisis Demografi etnik Indonesia, di tengah dominannya mayoritas Muslim 76%, tidak satu pun Etnik yang dominan di Maluku Utara dari 28 suku dan etnik. Persentase etnik yang relatif berimbang dapat dilihat dari angka statistik BPS tahun 2010 yaitu Tobelo 10,78%, Galela 9,70%, 9,40%, Makian 8,51%, Tidore 7.76%, Sula 6,98%, Buton 5,67%, Jawa 4,12%, Sangir 3,04%, Loloda 2,61%, Tobaru 2,24%, Kao 2,15%, Bugis 2,01%, Patani 1,84%, Bajo 1,73%; Lainnya 21, 46% (Ananta, et al., 2015:117). Hal ini mendorong konsentrasi kekuatan politik etnik relatif berimbang dalam motivasi dan distribusi sumberdaya ekonomi (Ananta, 2006).

Kedua, konflik horizontal di Maluku dan Maluku Utara tahun 1999-2002 telah membentuk peta kekuatan aktor-aktor partai politik berbasis etnik dan agama di era Reformasi ketika sistem multy party diberlakukan. Distribusi elite partai berbasis etnis dan agama di Maluku Utara ke dalam rekrutmen partai didominasi aktor politik yang memiliki pengaruh kuat lokal sejak

konflik komunal antara Etnis dan agama seperti Sultan, Tokoh Agama, Politisi Lokal, dan Pengusaha Lokal dan kelas menengah perkotaan (Smith, 2009), Pemimpin Agama, Pemimpin Tradisional (Klinken & Berenschot, 2014: 64), atau pola relasi patron-klien antara pengusaha dan penguasa politik lokal (Savirani, 2014: 134)

Ketiga, Maluku Utara pasca konflik kekerasan komunal, terbentuknya faksi politik yang berakar dari keterlibatan aktor kelompok komunal etnis, kelompok paramiliter, milisi, jaringan kriminal, organisasi etnis atau agama, faksi politik dan aktor ekonomi yang kuat (Wilson, 2005: 64). Faksi Muslim yang bertikai dalam konflik komunal (Wilson, 2005: 2) terpecah ke dalam pola persaingan internal Faksi politik kandidat Gubernur yaitu Mudaffar Syah (Sultan Ternate), Bahar Andili (Bupati Halmahera Tengah, Etnis Tidore), Syamsir Andili (Walikota Ternate, etnis Tidore) and Thaib Armain (Gubernur Maluku Utara, Etnis Makean).

Kompetisi antar Faksi Politik tidak hanya merefleksikan jejaring afiliasi politik dan patronase semata, namun juga beberapa hal lainnya seperti etnisitas. Demikian pula kepemimpinan politik saat ini tidak terlepas dari jejaring masa lampau ketika meletusnya konflik komunal melibatkan beberapa tokoh Abdul Gani Kasuba (tokoh PKS, Anggota DPR RI, Gubernur Maluku Utara dua periode, Etnis Tobelo), Arbi Samad (Dai kondang lokal, Tokoh Muhammadiyah, etnis Makean), Wahdah Zainal Imam (anggota DPRD Kota Ternate, DPRD Provinsi Maluku Utara, tokoh politik PPP, Etnis Makean) (Wilson, 2005: 195), serta Mudaffar Syah (Sultan Ternate, tokoh Politik Golkar Maluku Utara) yang bersebarangan dengan faksi elite politik islam

(Klinken, 2007: 160). Selain itu Abdurrahim Fabanyo, seorang tokoh Muhammadiyah, PNS BUMN yang beralih ke politisi PAN, etnis Tidore juga memiliki pengaruh dalam pembentukan awal struktur PAN di Maluku Utara. Tokoh PAN ini pernah berpasangan dengan Abdul Gafur (Tokoh Orde Baru Golkar, Putra berdarah Aceh-Patani Halmahera Tengah) pada Pilgub 2007 (Romli, 2007).

Keempat, Terbentuknya faksi politik di Maluku Utara berbasis etnis dilatarbelakangi oleh konflik komunal tahun 1999-2002 yang melibatkan berbagai faktor seperti perebutan peluang ekonomi, pemekaran provinsi yang kaya akan sumberdaya mineral pertambangan, politik yang tidak setara (*political inequality*), Tingginya level kompetisi politik (*high-level political competition*), lemahnya jaminan keamanan sosial (*insecurity*), pertentangan antara etnis dan agama (*ethnic and religious antagonism*), dan klaim territorial dan sumberdaya alam (Wilson, 2005: 195). Fenomena ini sebagai sebuah mata rantai yang tidak terputus kemudian bertransformasi ke Lembaga politik seperti partai politik dan Lembaga pemerintahan daerah dengan motivasi persaingan internal di berbagai ajang Pilkada Kabupaten dan Kota, Pemilihan Gubernur dan Pemilu legislatif. Pemekaran Provinsi Maluku Utara tahun 1999 melibatkan 3 tokoh politik kunci yaitu ketua Tim Pemekaran Rusdi Hanafi (Tokoh Muhammadiyah, ketua PPP Maluku Utara, dan Anggota DPRD Maluku, etnis Ternate), Rustam Konoras (partai Golkar, alumni HMI, etnis Tidore), Saiful Bahri Ruray (Partai Golkar, anggota DPRD dan alumni HMI).

Kelima, Tentu saja kekuatan partai politik setelah melewati konflik komunal di Maluku Utara mengalami dinamika baru.

Ideologi partai pada umumnya sebagai salah satu faktor penentu perpecahan partai dan terbentuknya rivalitas faksi politik. Heterogenitas ideologi partai dapat dilihat pada klasifikasi Golkar dan PDI-P (Nasionalis Negara) dan kelompok Islam PPP (Islam Tradisional), PAN (Modernis), PKS (Islam Progresif), PBB (Islam Orthodox), dan PKB sebagai Nasionalis Religi/Islam Kebangsaan (Sparingga, 2004: 21). Perbedaannya sangat jelas bahwa Golkar dan PDI-P ketika mengalami konflik internal namun kondisinya masih relatif stabil. Selain itu, telah terjadi pergeseran peta kekuatan Partai Politik Islam di Maluku Utara dari zaman Orde Lama, pemilu tahun 1955, kekuatan Partai politik Islam Masyumi menang 45 persen di Maluku Utara, sedangkan Parkindo Protestan 22 persen (Alfian 1971:157–60). Namun seiring dengan intervensi kekuatan politik Orde Baru dengan ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar), kekuatan partai Islam hanya terkonsentrasi pada PPP. Pasca Orde Baru runtuh, stabilitas partai ideologi Nasionalis/Sekuler lebih dominan sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 di Maluku Utara. Sebaliknya kekuatan politik Islam PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara mulai mengalami pergolakan faksi internal yang berdampak dan berpengaruh buruk terhadap stabilitas partai, stagnan dan menurunnya hasil pemilu dan pilkada dalam 5 tahun terakhir.

Pilihan terhadap ketiga partai tersebut juga dilatarbelakangi oleh dinamika sosial aktor partai PPP, PAN dan PKS lebih dominan di kalangan umat Islam. Aktor politik sebagai representasi tokoh umat Islam yang dikenal luas KH Abdul Gani Kasuba, pendiri Yayasan Alkhairat, kader PKS, Gubernur Maluku Utara 2 Periode; PAN, tokoh Islam Modernis Muhammadiyah seperti Abdurrahim

Fabanyo; di PPP Rusdi Hanafi, Tokoh Muhammadiyah dan pengusaha. Pengaruh figur aktor ini justru membuat partai tergantung pada kharisma dan modalitas yang dimilikinya, tetapi lemah mengatasi dampak dari persaingan internal dan perebutan posisi kunci partai antar faksi yang berkompetisi dalam Pemilu. Fenomena tentang penyebab munculnya faksionalisme pada PPP, PAN dan PKS dapat ditawarkan dengan pisau analisis Teori Boucek (2012), yaitu persaingan internal, perebutan posisi kunci di partai, heterogenitas dan ancaman perpecahan ideologi, serta motivasi kesejahteraan dan dilemma antara kolektivisme vs individualisme. Meskipun teori ini hanya bersifat sementara untuk peletak kerangka teori awal dalam menghasilkan temuan baru (Novelty).

Selain itu, keterlibatan aktor dalam berbagai faksi diikuti oleh warna ideologi politisi yang bervariasi. Latar belakang sosial dan ideologis aktor dalam faksionalisme partai-partai Islam didominasi ideologi gerakan Muhammadiyah, HMI, KAMMI, PMII, Alkhairat. PAN memiliki heterogenitas ideologi dan latar belakang anggota yang berasal dari pengusaha lokal, aktivis Muhammadiyah, alumni HMI, dan pensiunan PNS, akademisi, dan kekuatan organisasi lokal. Kehadiran pengusaha di PAN lebih bersifat kolektif dan banyak jumlahnya, maka kehadiran di PPP lebih bersifat individual dan terbatas jumlahnya. Aktor politik di PKS didominasi oleh mahasiswa aktivis KAMMI dan LDK-Kampus, sebagai kategori kaum muda.

Sedangkan level usia dewasa didominasi oleh aktor politik dengan latar belakang aktivis Islam yayasan Alkhairat yang lebih tradisional, pimpinan pondok Pesantren Hidayatullah, dan

Halakah Tarbiyah Islam (Abdullah & Machmud, 2019). Keterlibatan aktor dengan berbagai latar belakang organisasi yang digeluti selama ini bergantung pada kemampuan pengorganisasian faksi dalam kategori teori Bettcher (2005) faksi yang lemah (model faksi klientelisme-patronase dan faksi tendensi) dan faksi yang kuat (model faksi kepentingan dan dan faksi prinsipil).

Dampak dan Implikasi yang disebabkan oleh faksionalisme terhadap ketiga partai politik PPP, PAN dan PKS partai tentu saja dapat dilihat dari grafik perolehan suara dan kursi, perpecahan struktur partai, kesuksesan atau kegagalan partai dalam pemilu 2014 dan pemilu 2019, dan 2018. Kajian tentang dampak faksionalisme dapat dilihat dari rute faksi yang diungkapkan Boucek (2009) tentang wajah dan rute faksi yang kooperatif, kompetitif dan degeneratif. Analisis lainnya adalah Dampak faksionalisme terhadap ummat Islam di Maluku Utara

Akhir dari penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk mampu menemukan varian lain tentang teori penyebab faksionalisme yang ditandai oleh konflik dan perpecahan internal partai beraliran sosial keagamaan, kekuatan dalam pengorganisasian faksi, rute yang ditempuh dan posisi partai dalam manajemen dan demokratisasi intra-partai. Berbagai teori tersebut di atas digunakan sebagai alat Analisa terhadap studi kasus ini penyebab faksionalisme dan kemungkinan munculnya temuan teori baru tentang varian baru penyebab lainnya yang berbeda dengan teori dan indikator Boucek dan Bettcher sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Mengapa terjadi faksionalisasi di internal partai politik di Maluku Utara?
- 1.2.2 Aktor mana saja yang terlibat dalam faksionalisasi internal partai politik di Maluku Utara?
- 1.2.3 Apa implikasi dan dampak faksionalisasi terhadap keberlangsungan partai politik di Maluku Utara?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara tentang faksionalisasi internal partai, keterlibatan aktor dan Dampak dan Implikasi yang ditimbulkannya dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2019).

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini antara lain:

- 1.3.2.1. Mengetahui penyebab terjadinya faksionalisasi di internal PPP, PAN, dan PKS dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Maluku Utara.
- 1.3.2.2. Mengetahui keterlibatan aktor dan lembaga dalam faksionalisasi internal PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara.
- 1.3.2.3. Mengetahui implikasi dan dampak yang ditimbulkannya oleh faksionalisasi terhadap keberlangsungan PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara.

1.4. Manfaat Teoritis dan Praktis

Penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran baru tentang rute dan dampak faksionalisme partai (Boucek, 2009); Penyebab timbulnya faksionalisme partai (Boucek, 2012); dan pengorganisasian dan motivasi faksi partai politik (Bettcher, 2005). Teori ini digunakan dalam menganalisa faksionalisasi internal Partai Islam PPP, PAN dan PKS di Maluku Utara sejak tahun 2014-2019. Hasil analisa penelitian ini mengungkapkan temuan baru/*novelty* tentang pergeseran urutan penyebab faksionalisme, pergeseran rute dan dampak faksionalisme, dan munculnya varian baru tentang model pengorganisasian faksi klienterisme dan patronase yang lebih solid dan kuat di beberapa faksi Partai Politik Islam di Maluku Utara.

Manfaatnya, teori baru (*Novelty*) tentang kebaruan atas penyebab faksionalisme didominasi oleh persaingan internal, dampak terhadap PPP lebih bersifat denegeratif parsial/relatif, PAN menyerupai siklus kompetitif negatif-positif yang tidak stabil, serta PKS sebagai faksi kooperatif semu, model pengorganisasian dan motivasi faksi aktor politik didominasi faksi keluarga, dinastik dan pemodal berbasis etnis dominan di Maluku Utara.

Secara praktis penelitian ini melahirkan teori baru dan dapat menjadi riset lanjutan tentang menguatnya pengaruh politik pragmatisme faksi keluarga, dinastik dan pemodal berbasis etnis dominan yang telah membajak eksistensi Partai politik sebagai Partai Ummat Islam. Hal ini berdampak terhadap perpecahan internal, kegagalan dalam pemilu dan diskonektivitas vertikal antara partai politik dengan ummat Islam di Maluku Utara.

1.5 Publikasi Disertasi

Salah satu syarat dari naskah disertasi ini adalah adanya publikasi jurnal internasional. Adapun beberapa publikasi dari disertasi ini adalah sebagai berikut:

Aji Deni , Achmad Nurmandi, Titin Purwaningsih, Zuly Qodir 2020. Factionalization of Political Parties in North Moluccas, Indonesia “International Journal of Innovation, Creativity and Change” Link. https://www.ijicc.net/images/vol12/iss8/12837_Deni_2020_E_R.pdf